

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya aparatur atau di Indonesia disebut dengan pegawai negeri sipil (PNS) merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk menjalankan tugas pemerintahan yang maksimal perlu dilakukan pengembangan sumber daya aparatur.

Pengembangan sumber daya aparatur dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Sedangkan bagi organisasi pemerintah diklat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pegawai.

Pengembangan sumber daya manusia menurut Notoatmodjo (2015: 8) adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal. Hasil ini dapat berupa jasa maupun benda atau uang. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu

ada dalam 4 bagian yakni, pelatihan pegawai (*employee training*), pendidikan pegawai (*employee education*), pengembangan pegawai (*employee development*), pengembangan non-pegawai (*non-employee development*). Kegiatan ketiga area yang pertama (pelatihan, pendidikan, pengembangan pegawai) adalah merupakan kegiatan pokok untuk pengembangan sumber daya manusia (pegawai) dalam suatu institusi atau departemen dalam kegiatannya untuk pengembangan organisasi institusi atau departemen yang bersangkutan. Sedangkan area yang ke-4 (*non-employee development*) pada hakikatnya adalah pelaksanaan fungsi social dari institusi tersebut. Di mana suatu institusi atau departemen menurut Nadler juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota masyarakat yang bukan pegawai dan institusi.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil (PNS).

Untuk provinsi Gorontalo saat ini terus berbenah diri dalam berbagai pembangunan yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada pegawainya serta membangun kerjasama dengan masyarakat.

Akuntabilitas instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintahan yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo adalah perangkat daerah Provinsi yang terbentuk dengan perda nomor : 6 tahun 2009 tanggal 30 September 2009 dan tugas serta fungsinya untuk penanggulangan bencana sesuai peraturan gubernur Gorontalo nomor : 21 tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.

Tabel 1.1
Data Diklat yang Diikuti ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Gorontalo 3 Tahun Terakhir

NO	NAMA DIKLAT YANG DIKUTI	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Diklat PIM II	1		
2	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	2		
3	Pelatihan Potensi SAR Gunung, Rimba dan laut	2		
4	Pelatihan Pengenalan Peralatan dan Perahu Dholpin	1		
5	Pelatihan Revolusi Mental		1	
6	Diklat Teknis Operasional Peralatan Gempa Bumi		1	
7	Diklat Teknis Operasional Peralatan Distance Learning		2	
8	Pelatihan pelayanan bagi supir pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo		1	
9	Pelatihan koordinasi dan kaji cepat penanggulangan bencana		2	
10	Pelatihan Penanggulangan Bencana Nasional Kajian Resiko Bencana		2	
11	Diklat Penyusunan AKD		1	
12	Pelatihan Teknis Operasional Radio Komunikasi			1
13	Pelatihan Teknis Aplikasi SimPD			2
14	Diklat Bendahara			1
Jumlah		6	10	4

Sumber: BPBD Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo jumlah keseluruhan pegawai yaitu 56 orang. Dengan melihat data diatas bahwa jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2015 berjumlah 6 pegawai, tahun 2016 berjumlah 10 pegawai dan pada tahun 2017 berjumlah 4 pegawai. Maka dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir pegawai yang mengikuti diklat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo sebanyak 20 pegawai. Kurangnya pegawai yang mengikuti diklat memungkinkan proses pelayanan aparatur cenderung rendah ditingkat masyarakat seperti penyampaian informasi mengenai bencana kurang tepat dan layanan kualitas kerja kepada masyarakat masih cenderung rendah dan emosional saat memberikan bantuan.

Sehingga peneliti merasa perlu menetapkan judul penelitian “Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pegawai yang mengikuti Diklat. Hal ini dapat dilihat dari data Diklat yang diikuti pegawai BPBD Provinsi Gorontalo 3 tahun terakhir.
2. Sementara dari aspek layanan kerja kepada masyarakat seperti penyampaian informasi mengenai bencana masih kurang tepat dan

layanan kualitas kerja kepada masyarakat masih cenderung rendah dan emosional saat memberikan bantuan.

1.3 Fokus Masalah

Dari data observasi peneliti maka fokus masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu penelitian khususnya bidang Manajemen Sumber Daya Manusia terutama yang mengkaji tentang pengembangan SDM melalui Diklat.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk masyarakat umum dalam Pengembangan Manajemen SDM Aparatur melalui Diklat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.